

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan perencanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa ; dan
- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

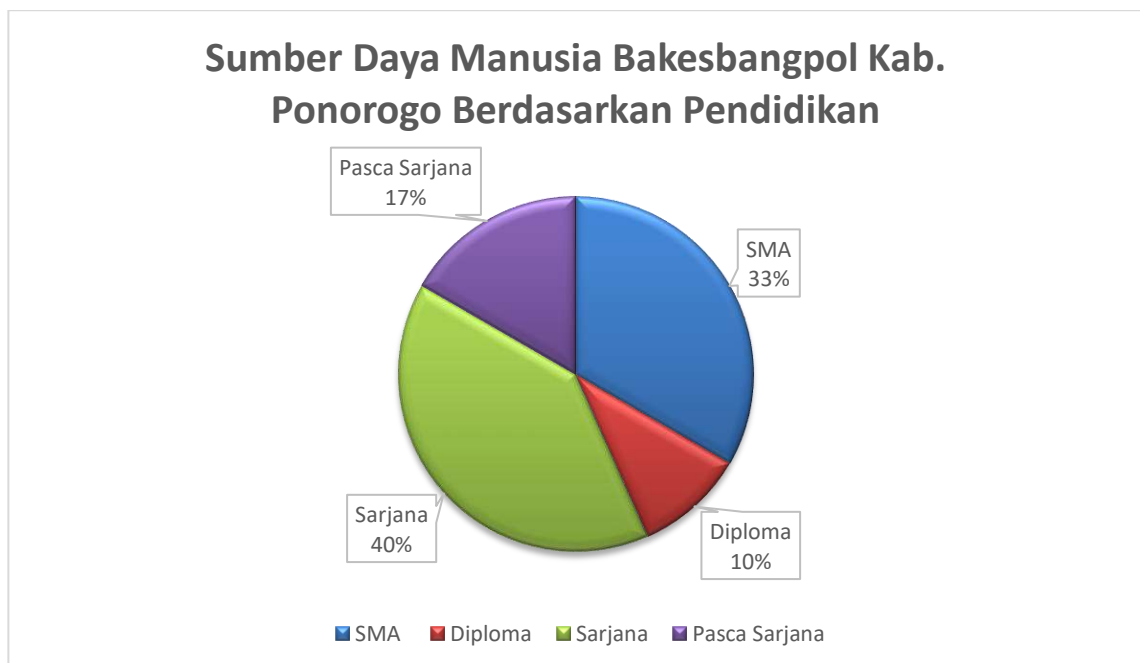
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



C. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan memiliki indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan dengan target 100%. Capaian target tersebut pada tahun 2025 mencapai 100% maka masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan instansi lain yang mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah meningkatkan upaya cegah dini terjadinya konflik melalui :

1. Mengefektifkan kinerja Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebagai penggali informasi intelejen;
2. Pembentukan Tim pelaksana koordinasi penanganan konflik sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015);
3. Merevitalisasi keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

4. Merevitalisasi keberadaan Forum Komunikasi Pencak Silat Dan Beladiri (FKPSB);
5. Meningkatkan peran sinergitas Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi timbulnya konflik. Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung)
	Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dgn Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertanyakan.

BAB III PENUTUP

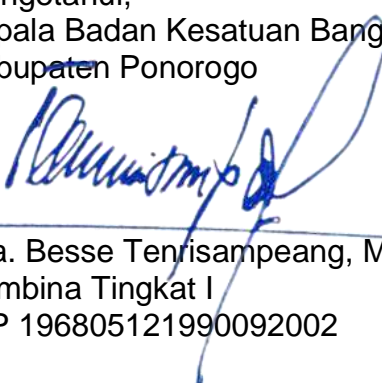
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

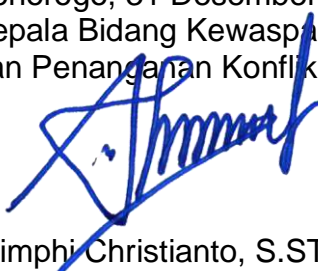
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025, capaian kinerja indikator kinerja dengan kriteria **Berhasil** (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja di Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana tindak lanjut.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik


Wimphi Christianto, S.STP.
Pembina
NIP 197902251999121001